

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022  
Waktu : 10:00 WITA – Selesai  
Tempat : Laboratorium Departemen  
Ilmu Sejarah.

**PENERAPAN TANAMAN WAJIB INDUSTRI  
DI KABUPATEN BANTAENG 1960-1968**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

**OLEH**

**ISNAENI**

**Nomor Pokok: F811 15 001**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENERAPAN TANAMAN WAJIB INDUSTRI  
DI KABUPATEN BANTAENG 1960-1968**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

**OLEH**

**ISNAENI**

**Nomor Pokok: F811 15 001**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**SKRIPSI**

**“PENERAPAN TANAMAN WAJIB INDUSTRI  
DI KABUPATEN BANTAENG 1960-1968”**

Disusun dan diajukan oleh

**ISNAENI**

**F811 15 001**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.

**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Konsultan I**

**Dr. Nahdia Nur., M.Hum.**  
**NIP. 196503211998032001**

**Konsultan II**

**A. Lili Evita, S.S., M.Hum.**  
**NIP. 199001112019032017**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

**Prof. Dr. Akin Duli, M.A**  
**NIP. 196407161991031010**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah  
Universitas Hasanuddin**

**Dr. Ilham, S.S., M.Hum.**  
**NIP. 197608272008011011**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Selasa, 21 Juni 2022 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**“PENERAPAN TANAMAN WAJIB INDUSTRI  
DI KABUPATEN BANTAENG 1960-1968”**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Juni 2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

- |                                   |                |                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Nahdia Nur., M.Hum.        | Ketua :        |   |
| 2. A. Lili Evita, S.S., M.Hum.    | Sekretaris :   |  |
| 3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. | Penguji I :    |  |
| 4. Nasihin, S.S., M.A.            | Penguji II :   |  |
| 5. Dr. Nahdia Nur., M.Hum.        | Konsultan I :  |  |
| 6. A. Lili Evita, S.S., M.Hum.    | Konsultan II : |  |

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Isnani

Nim : F81115001

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul Skripsi : Penerapan Tanaman Wajib Industri di Kabupaten Bantaeng  
1960-1968.

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya serta sebenar-benarnya bahwa, skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri kecuali kutipan yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin batal saya terima.

Makassar, 22 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Isnani

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamiin.*

Segala puji bagi Allah, kita memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang Dia beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Dia sesatkan maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah (petunjuk). Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, serta para sahabat beliau, juga kepada setiap orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga *yaumul akhir*. Aamiin.

*Alhamdulillah*, rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan nikmat keimanan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Tanaman Wajib Industri di Kabupaten Bantaeng 1960-1968”** dengan baik. Begitu panjang perjalanan dalam penyelesaian tugas akhir ini, mulai dari masa proposal hingga bertemu masa pandemi yang dimana masa ini *qadarullah* penulis sempat vakum dalam melakukan penelitian. Hingga kemudian penulis kembali menghubungi teman-teman yang juga masih proses tugas akhir untuk segera ke kampus, menyelesaikan tugas akhir walaupun pandemi belum berakhir.

Selesainya skripsi ini dapat tercapai bukan hanya karena kerja keras penulis, tapi juga atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam perbaikan penulisan, dukungan materi maupun moril dalam meningkatkan motivasi penulis untuk merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Ilham S.S., M.Hum., selaku ketua Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Nahdia Nur, M.Hum., selaku pembimbing I penulis dan Ibu A. Lili Evita, S.S., M.Hum., selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran serta dorongan semangat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A., (*rahimahullah*), Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Bambang Sulistyono P., M.S., Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag., Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum., Drs. Dias Pradadimara, M.A., Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D., selaku dosen penasihat akademik (PA) penulis, Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum., Nasihin, S.S., M.A., (Alm.) Edward L. Poelinggomang, M.A., (Alm.) Margriet Moka Lappia, S.S., M.S., yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus. Tak lupa pula

penulis mengucapkan terimakasih kepada kepala sekretariat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Bapak Uddji Usman S.Sos., yang senantiasa membantu penulis dalam pengurusan berkas hingga penulis dapat menyelesaikan berkas dengan cepat dan lancar.

4. Kepada Dekan dan Wakil Dekan serta seluruh jajaran staf tata usaha Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hsanuddin yang telah memberikan fasilitas dan layanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
5. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda As'ad dan ibunda Johar yang telah memberikan cinta, do'a, perhatian, kasih sayang dan dukungan materil yang tidak dapat penulis balas dengan apapun. Terimakasih karena senantiasa bersabar, mendidik, membimbing, dan mengiringi setiap langkah penulis serta do'a dan harapan yang besar kepada penulis agar dapat sukses dalam menggapai cita-cita. Kepada saudara-saudaraku Johoriah, Jusriah, Fitriani, Asliah, Nurmadiyah (*rahimahallah*), dan Sunarti, serta kepada keponakan penulis Nurfadila, Nur Intan, dan Muhammad Al Fatih, terimakasih atas semangat, do'a, dan dukungan dari kalian sehingga penulis senantiasa merasakan kehangatan dalam keluarga.
6. Kepada teman-teman Ilmu Sejarah 2015 (*Max Havelaar*) yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis dalam menempuh pendidikan dan menjalani rutinitas di kampus. Ada Dian, Leha, Mila, Fitri, Selfi, Yuyun, Idar, Yuli, Luli, Suci, Suke, Cici, Isna Tahir (yang menjadi teman satu pondokan penulis sehingga banyak bertukar pikiran), Ria, Gama, Alif,



Adi, Afif, Ibnu, Putra, Arul, Darul, Fitrah, terimakasih atas waktu dan kebersamaan selama menjalani pendidikan di kampus.

7. Kepada teman-teman akhawat di UKM LDM AL-ADAB FIB UNHAS dan di UKM LDK MPM UNHAS syukran jazakunallahukhair atas segala kebersamaan, ukhuwah, dan ilmu yang penulis dapatkan selama bersama antunna.
8. Untuk teman-teman KKN Tematik TMMD Majene gelombang 99 (terkhusus Posko 3 squad, Mirna, Dian, Leha/Lisa, Limra, dan Amran) terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan yang penulis dapatkan selama bersama kalian.
9. Untuk teman sekamar di Ramsis Unhas Nur Amaliah Ichsani, S.TP., tetangga kamar Rusdaeni, S.Si., dan Siska, S.S., yang menjadi teman penulis selama tinggal di Ramsis Unhas, banyak moment dan kenangan yang akan senantiasa dirindukan.
10. Serta kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan bantuan yang tulus kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan membuka diri dalam menerima koreksi dan kritik yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi

pihak-pihak yang memerlukannya dalam penulisan karya ilmiah berikutnya. Aamiin.

Makassar, Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	11
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.6 Metode Penelitian .....	14
1.7 Tinjauan Pustaka .....	17
1.8 Sistematika Penulisan .....	20
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTAENG .....	21
2.1 Letak Geografis Kabupaten Bantaeng .....	21
2.2 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Bantaeng .....	26

2.3	Pengertian Tanaman Wajib Industri .....	30
2.4	Aturan Tanaman Wajib .....	37
2.5	Tokoh Yang Terlibat Dalam Program Tanaman Wajib di Kabupaten Bantaeng .....	50
BAB III PENERAPAN TANAMAN WAJIB INDUSTRI DI KABUPATEN BANTAENG.....		55
3.1	Kelapa .....	63
3.2	Kopi.....	68
3.3	Kapuk .....	74
3.4	Karet.....	78
3.5	Merica/Lada.....	79
3.6	Cengkeh .....	79
BAB IV DAMPAK TANAMAN WAJIB INDUSTRI .....		80
4.1	Respon Petani Terhadap Program Tanaman Wajib Industri .....	80
4.2	Terbentuknya PT. Kapuk Indonesia Perwakilan Makassar dan Lembaga Kapuk Sulawesi Selatan .....	85
4.3	Terbentuknya Perusahaan Dagang Kopra dengan nama PD. NYIUR INDAH .....	89
4.4	Dampak Tanaman Wajib Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat .....	90
BAB V PENUTUP .....		97
5.1	Kesimpulan .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....		101
LAMPIRAN .....		106

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Keadaan Lahan di Bantaeng tahun 1960 .....	24
Gambar 2.2 Peta Pembagian Wilayah Bantaeng tahun 1962 .....	29
Gambar 2.3 Peta Lokasi Tanaman Wajib Kelapa di Sulawesi Selatan tahun 1966.....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Keadaan Tanaman Industri/Ekspor di Sulawesi Selatan Tahun 1960-1966.....	9
Tabel 2.1: Jumlah dan luas areal tanaman karet Sulawesi Selatan 1966/1967.....	48
Tabel 2.2: Luas perkebunan tanaman cengkeh di Sulawesi Selatan.....	49
Tabel 3.1: Daftar Rencana Penanaman Tanaman Industri Dalam Kabupaten Bantaeng Tahun 1966.....	59
Tabel 3.2: Perkembangan tanaman kelapa pada triwulan IV tahun 1961.....	64
Tabel 3.3: Target Luas Peremajaan dan Perluasan Tanaman Kelapa tahun 1965.....	66
Tabel 3.4: Perkembangan tanaman kopi pada triwulan IV tahun 1961.....	69
Tabel 3.5: Target Luas Peremajaan dan Perluasan Tanaman Kopi tahun 1965.....	71
Tabel 3.6: Perkembangan tanaman kapuk pada triwulan IV tahun 1961.....	74
Tabel 3.7: Target Luas Peremajaan dan Perluasan Tanaman Kapuk tahun 1965..	75

## ABSTRAK

**Isnaeni (F81115001), dengan judul “Penerapan Tanaman Wajib Industri di Kabupaten Bantaeng 1960-1968”, dibimbing oleh Dr. Nahdia Nur, M.Hum. dan A. Lili Evita, S.S., M.Hum.**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng tahun 1960-1968 yang dimana jenis tanaman yang ditanam seperti kelapa, kopi, kapuk, karet, merica/lada, dan cengkeh. Selanjutnya, tujuan lain dari penelitian ini yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari penerapan tanaman wajib terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Bantaeng.

Metode penelitian dalam skripsi ini terdiri atas beberapa tahapan penting yang diawali dengan pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber atau kredibilitas sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan sejarah). Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (SULSELRA) 1960-1964 Volume II, serta arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 1964-1974 Volume I.

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengkajian dan analisis terhadap sumber literatur yang ada, skripsi ini membahas mengenai penerapan tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng tahun 1960-1968. Beberapa faktor pendukung, seperti wilayah Bantaeng yang terdiri atas bukit pegunungan, lembah daratan dan pesisir pantai dengan iklim yang tergolong tropis basah, serta daerah Bantaeng yang memiliki tanah jenis vulkanis yang sangat cocok dengan pertanian. Adapun pelaksanaan tanaman wajib industri ini, masyarakat terdorong karena adanya instruksi dari gubernur Sulawesi Selatan serta masyarakat tertarik karena adanya perlombaan tanaman wajib yang kemudian dilakukan pemberian hadiah kepada pemenang lomba.

**Kata kunci :** Penerapan, Tanaman wajib industri, Bantaeng, ekonomi dan sosial.

## ABSTRACT

**Isnaeni (F81115001), with the title "Implementation of Industrial Mandatory Crops in Bantaeng Regency 1960-1968", was supervised by Dr. Nahdia Nur, M. Hum. and A. Lili Evita, S.S., M. Hum.**

This study aims to provide an overview of how the application of industrial mandatory crops in Bantaeng Regency in 1960-1968 where the types of plants grown such as coconut, coffee, kapuk, rubber, pepper, and cloves. Furthermore, another objective of this research is regarding the impact of the application of mandatory crops on the economic and social conditions of the Bantaeng community.

The research method in this thesis consists of several important stages starting with topic selection, heuristics (source collection), verification (source criticism or source credibility), interpretation (analysis and synthesis), and historiography (historical writing). The primary sources used in this research are the archives of Bantaeng (1866-1973) Volume 3, the archives of the Provincial Government of South and Southeast Sulawesi (SULSELRA) 1960-1964 Volume II, and the archives of the Provincial Government of South Sulawesi 1964-1974 Volume I.

Based on the results of research through assessment and analysis of existing literature sources, this thesis discusses the application of mandatory industrial plants in Bantaeng Regency in 1960-1968. Several supporting factors, such as the Bantaeng area which consists of mountainous hills, mainland valleys and coastal areas with a wet tropical climate, as well as the Bantaeng area which has volcanic soil types that are very suitable for agriculture. As for the implementation of this mandatory industrial plant, the community was encouraged because of the instructions from the governor of South Sulawesi and the community was interested because of the mandatory crop competition which was then awarded to the winner of the competition.

**Keywords:** Application, Mandatory industrial plants, Bantaeng, economic and social.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi.<sup>1</sup> Di negara-negara berkembang<sup>2</sup>, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (*commercial agriculture*) yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan yang dibawa oleh pemerintah kolonial atau yang didirikan oleh korporasi kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa (*European plantation*), yang berbeda dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa prakolonial. Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap kehidupan masyarakat tanah jajahan atau negara-negara berkembang.

---

<sup>1</sup> Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanaman> diakses tanggal 26 Januari 2022 pukul 13:30 WITA.

<sup>2</sup> Negara berkembang adalah suatu negara yang pendapatan rata-ratanya rendah, infrastruktur relatif berkembang, dan indeks perkembangan manusia berada dibawah standar normal global.

Karena itu perkembangan perkebunan di negara-negara berkembang berkaitan erat dengan proses modernisasi.<sup>3</sup>

Sistem perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal (*capital intensive*), penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan (*wage labour*), struktur hubungan kerja yang rapih, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia. Sistem perkebunan demikian merupakan bagian dari kegiatan sektor perekonomian modern, yang berasal dari dunia Barat. Kehadirannya di negara-negara berkembang pada umumnya berhubungan erat dengan proses kolonialisme dan modernisasi, karena itu hubungan sejarah perkebunan dengan sejarah kolonialisme sangatlah erat.<sup>4</sup>

Pembukaan perkebunan menimbulkan lingkungan baru, yaitu lingkungan perkebunan. Lingkungan perkebunan ini biasanya dibentuk oleh kesatuan lahan penanaman tanaman komoditi perdagangan, pusat pengolahan produksi (pabrik), dan komunitas pemukiman penduduk yang terlibat dalam kegiatan perkebunan. Secara topografis, perkebunan sering dibangun di daerah yang subur, baik yang ada di daerah dataran rendah maupun yang ada di dataran tinggi. Tanaman yang dibudidayakan homogen (komoditi ekspor), dan berbeda dengan tanaman

---

<sup>3</sup> Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 3.

<sup>4</sup> *ibid.*, hlm. 4.

pertanian subsistem setempat. Bentuk orientasi lingkungan perkebunan yang lebih tertuju ke dunia luar, menjadikan lingkungan perkebunan seolah-olah terpisah dari lingkungan agraris setempat. Lebih-lebih karena perkebunan memiliki teknologi yang maju, maka perbedaannya dengan lingkungan sekitarnya menjadi menonjol.<sup>5</sup>

Pembangunan dalam pertanian merupakan bentuk respon manusia terhadap lingkungannya. Salah satu kegiatan pembangunan terjadi di Indonesia adalah pembangunan industri. Pembangunan industri ini merupakan suatu bentuk perwujudan dalam melaksanakan ketetapan GBHN, yakni dicapainya sasaran-sasaran jangka panjang, dan memberikan landasan yang kuat dalam tahap pembangunan selanjutnya.<sup>6</sup>

Sejak pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto, pembangunan industri telah digalakkan, utamanya menyediakan kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu, pembangunan industri diharapkan pula memberikan sumbangan yang besar bagi kekuatan ekonomi nasional serta ketahanan nasional pada umumnya. Realisasi dari aspek pemerataan dibidang pembangunan, menyebabkan pembangunan industri dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan, suatu daerah yang dahulu belum mengenal industri sebagai suatu lapangan kehidupan, kemungkinan

---

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm. 7.

<sup>6</sup> Muh. Yamin Sani dkk, *Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 1-2.

akan bertumbuh menjadi daerah industri dengan segala akibat berupa perubahan-perubahan yang terjadi sebagai pengaruh industri tersebut.<sup>7</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan industri khususnya pembangunan dibidang pertanian menggunakan strategi yang biasa disebut politik pertanian.<sup>8</sup> Ketika berbicara tentang politik pertanian ada dua komponen didalamnya yakni petani dan pemerintah. Petani adalah pihak yang menggarap dan mengelolah tanah, sedangkan pemerintah adalah pihak yang mengatur dan mengusahakan suasana dan iklim agar pertanian dapat berkembang dan terus-menerus mengalami kemajuan. Sementara itu politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian. Dan pembangunan pertanian tidak hanya menyangkut kegiatan petani saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan, perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi atau lembaga-lembaga pemerintah dan semi pemerintah.<sup>9</sup>

Diawal masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan. Kemerosotan ekonomi ini disebabkan karena pengelolaan ekonomi yang kurang berhasil, seperti kurangnya kualitas hasil

---

<sup>7</sup> *ibid.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Politik pertanian sebagai ilmu tidak bertujuan membela sesuatu kepentingan tertentu. Tugasnya adalah menganalisis berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pertanian. Faktor-faktor ini mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, teknik, dan lain-lain. Dikutip dari Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 3 No. 2 Juni 2019, Wini Fetia Wardhiani, Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Sektor Pertanian. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/120/117> diakses tanggal 27 Januari 2022, Pukul 10:45 WITA.

<sup>9</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm.17 dan 13.

ekspor, harga bahan mentah Indonesia sangat rendah di pasaran, serta seretnya pemasukan pajak. Selain itu, Indonesia juga harus membayar utang luar negeri sebesar 2,6 miliar dollar Amerika (termasuk utang warisan Belanda dari tahun 1896-1949).

Pada tahun 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret yang kemudian ditetapkan oleh MPRS dengan surat ketetapan No. IX/MPRS/1966 dan menandakan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno ke kepemimpinan Soeharto. Kepemimpinan Presiden Soeharto ini didampingi oleh Adam Malik dan Sultan Hamengku Buwono IX sehingga mereka sering disebut Tiga Serangkai. Awal kepemimpinan Tiga Serangkai ini menghadapi permasalahan yang berat dan mereka berusaha menjalankan peran penyelamatan dalam periode krisis. Sultan Hamengku Buwono IX bertanggungjawab dalam bidang ekonomi dimana beliau menduduki jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Waperdam Ekubang), Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan (Menutama EKKU), dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Meneg EKUIN) telah berhasil melakukan perbaikan ekonomi. Serta berperan dalam stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian Indonesia. Beliau adalah seorang raja di Kesultanan Yogyakarta yang berada dibawah pemerintahan Republik Indonesia, beliau juga memiliki perhatian besar dalam bidang ekonomi.

Sultan Hamengku Buwono IX yang bertanggungjawab dalam bidang ekonomi, mengambil kebijakan-kebijakan di dalam negeri maupun dengan ekonomi luar negeri. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan

dua pernyataan politik pada tanggal 12 April 1966.<sup>10</sup> Sultan mengatakan bahwa stabilitas ekonomi harus menjadi prioritas utama bagi Indonesia dan Indonesia akan membuka tangan bagi datangnya bantuan asing. Hal ini dilakukan untuk mengatasi inflasi yang melambung tinggi, defisit anggaran, untuk menambah devisa, penundaan hutang luar negeri, dan untuk mendapat kredit baru.<sup>11</sup> Selain itu, guna melibatkan daerah-daerah di Indonesia secara aktif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, maka pemerintah pusat mengizinkan setiap daerah memanfaatkan sumber-sumber ekonomi mereka untuk kepentingannya sendiri sepanjang tetap mematuhi kebijaksanaan pemerintah pusat.<sup>12</sup>

Pada tanggal 4 Mei 1966 menteri Uppenas mengeluarkan surat dengan nomor 98/M/66 tentang proyek-proyek yang akan menerima bantuan subsidi pemerintah daerah didalam anggaran belanja pembangunan tahun 1966. Kemudian dalam wilayah Sulawesi Selatan pemerintah mengeluarkan surat pada tanggal 1 Agustus 1966 dengan tujuan untuk meningkatkan produksi tanaman bahan industri atau ekspor. Isi dari surat tersebut adalah penanaman wajib tanaman industri atau ekspor. Hal ini dilakukan atas dasar banyaknya tanah kosong yang masih luas di Sulawesi Selatan, potensi para petani yang sangat

---

<sup>10</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman, antara lain: tanaman wajib, tanaman export dan masalah pengerahan tenaga pada musim tanam*, Nomor Registrasi 869.

<sup>11</sup> Inflasi yaitu kemerosotan nilai mata uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Defisit Anggaran yaitu kekurangan anggaran belanja. Devisa yaitu alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Kredit yaitu pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

<sup>12</sup> Rizal Zamzami, *Kebijakan Ekonomi Sultan Hamengku Buwono IX Pada Awal Orde Baru Tahun 1966-1973* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 6-7.

besar, serta tanah dan iklim yang cocok dengan berbagai tanaman bahan industri atau ekspor.<sup>13</sup>

Surat tersebut juga berisi instruksi kepada seluruh walikota, bupati atau kepala daerah se-Sulawesi Selatan agar :

- a. Mengeluarkan surat keputusan bagi lingkungan atau daerah masing-masing tentang pelaksanaan penanaman tanaman wajib industri atau ekspor.
- b. Menetapkan jenis tanaman untuk setiap kecamatan dan desa, melaksanakan wajib tanam dengan prinsip berdikari terutama jika bibit yang telah tersedia di daerah masing-masing.
- c. Membentuk panitia perencana, pembimbing, dan penilai di setiap kabupaten, serta panitia pembimbing dan pelaksana di setiap kecamatan dan desa.
- d. Menghubungi semua aparat dinas Pertanian dan Rakyat dan aparat Kemakmuran lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tanaman wajib tersebut.
- e. Setiap daerah yang terlibat dalam tanaman wajib industri ini diharapkan melaporkan segala perkembangan maupun hasil dari pelaksanaan instruksi tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman, antara lain: tanaman wajib, tanaman export dan masalah pengerahan tenaga pada musim tanam*, Nomor Registrasi 869.

<sup>14</sup> *ibid.*

Selain tanaman pertanian pangan, tanaman industri atau ekspor juga menunjang pertumbuhan industri di Sulawesi Selatan selama periode 1960-1966. Seperti tanaman kelapa yang merupakan bahan baku kopra. Kopra sendiri dihasilkan dari daerah yang memiliki wilayah pantai yang potensial ditumbuhi tanaman kelapa serta dari perkebunan rakyat. Kopra merupakan bahan baku pembuatan minyak goreng dan merupakan hasil perkebunan yang diekspor. Tanaman industri lainnya seperti kopi, karet, lada, kapuk, dan cengkeh juga turut memberikan sumbangsih terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Meskipun dalam penjalanannya sektor ini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan tetapi tetap mempunyai sumbangsih yang cukup penting dalam perindustrian di Sulawesi Selatan. Kurang berkembangnya sektor ini disebabkan oleh terbatasnya pembiayaan, perlengkapan, dan kesulitan dalam pemasaran produksi.<sup>15</sup> Karena hal tersebut pemerintah berusaha untuk meningkatkan sektor ini melalui program Tanaman Wajib Industri/Ekspor yang dimulai dari adanya surat edaran gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Agustus 1966. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menggiatkan *eksport drive* Sulawesi Selatan sehingga mampu menghasilkan pemasukan untuk menambah devisa.

Berikut ini adalah tabel tentang keadaan tanaman industri/ekspor daerah Sulawesi Selatan tahun 1960-1966:

---

<sup>15</sup> Pidato Serah Terima Jabatan Gubernur/Kepala Daerah Sulawesi Selatan dari Brigadir Djenderal A. A. Rivai Kepada Letnan Kolonel A. Lamo dalam Laporan dan Memorie Serah Terima Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 20-4-1960 – 13-10-1966. hlm. 79-80. Dikutip dari skripsi, Teguh Wijoyo Kusuma, *Perencanaan Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Sulawesi Selatan Masa Gubernur A. A. Rivai (1960-1966)*, (Makassar: Departemen Ilmu Sejarah Unhas, 2017), hlm. 106.



No	Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)						
		1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
1.	Kelapa	49.350	49.375	49.450	49.500	49.531	51.524	50.375
2.	Kopi Rakyat	949	1.400	1.421	1.578	1.598	2.448	2.500
3.	Kapuk	1.328	997	1.449	974	702	766	726
4.	Kemiri	2.395	2.392	4.230	4.410	4.425	4.352	3.240
5.	Kapas	-	16	17	-	-	2,25	50
6.	Karet Rakyat	-	-	-	-	-	-	15
7.	Cengkeh	-	-	-	-	-	0,05	0,04
8.	Tembakau Rakyat	3.236	894	2.350	2.448	3.249	1.358	4.500
9.	Tembakau Virginia	335	-	63	-	-	-	40
10.	Tebu Rakyat	-	20.000	20.000	21.500	21.950	57.300	5.405
11.	Jarak	-	-	-	-	-	9	245
12.	Lada	4	4	9	11	16	15	15
13.	Pala	-	-	-	-	-	-	8

**Tabel 1.1:** Keadaan tanaman industri/ekspor tahun 1960-1966<sup>16</sup>

Tabel di atas menunjukkan jumlah tanaman industri/ekspor di Sulawesi Selatan selama periode 1960-1966 memiliki jumlah produksi yang tinggi, kecuali pada beberapa tanaman seperti karet rakyat, cengkeh, jarak, dan pala yang tidak memiliki nilai produksi yang tinggi, hal ini dapat disebabkan karena tanaman tersebut memiliki masa panen yang lama dan prospek di pasaran yang belum baik.

Tanaman kelapa memiliki jumlah produksi yang paling tinggi diantara tanaman lainnya. Hal tersebut dikarenakan hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan merupakan penghasil kelapa. Tanaman kelapa merupakan bahan baku kopra dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu penghasil kopra di kawasan timur

<sup>16</sup> Pidato Serah Terima Jabatan Gubernur/Kepala Daerah Sulawesi Selatan dari Brigadir Djenderal A. A. Rivai Kepada Letnan Kolonel A. Lamo dalam Laporan dan Memorie Serah Terima Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 20-4-1960 – 13-10-1966. hlm. 79-80. Dikutip dari skripsi, Teguh Wijoyo Kusuma, *ibid.*, hlm. 107-108.

Indonesia. Selain bahan baku kopra, kelapa juga dapat diolah menjadi minyak kelapa dan minyak kelapa merupakan bahan baku pembuatan margarine. Banyaknya manfaat dari tanaman kelapa ini sehingga pembudidayaannya semakin diperluas.

Tanaman kopi dalam tabel di atas setiap tahunnya juga mengalami peningkatan produksi. Peningkatan ini disebabkan oleh luas lahan yang semakin bertambah dari tahun 1961 dengan luas 4.965 Ha menjadi 9.696 Ha pada tahun 1966. Hal lain yang menjadi penyebab meningkatnya tanaman ini adalah adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi kopi di Sulawesi Selatan.<sup>17</sup>

Keragaman jumlah produksi dari komoditas tersebut di atas juga dipengaruhi oleh luasnya lahan yang digunakan untuk penanaman, selain itu pemerintah melalui kebijakannya turut berperan aktif dalam peningkatan jumlah produksi. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah penanaman wajib terhadap beberapa komoditas industri seperti; kelapa, kopi, kapuk, kemiri, cengkeh, dan lada; serta didirikannya industri khusus yang menangani komoditas tertentu juga mendukung peningkatan jumlah produksi.

Sebagai kesimpulan dari semua pernyataan di atas penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam dari penanaman tanaman wajib ekspor ini, bagaimana peran pemerintah didalamnya, serta apa dampak yang dihasilkan dari adanya program ini bagi petani. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian

---

<sup>17</sup> Teguh Wijoyo Kusuma, *Perencanaan Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Masa Gubernur A. A.Rivai (1960-1966)*, (Makassar: Departemen Ilmu Sejarah Unhas, 2017), hlm. 109.

dengan judul **“Penerapan Tanaman Wajib Industri di Kabupaten Bantaeng tahun 1960-1968”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Penulisan sejarah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang suatu kajian sejarah kepada masyarakat, berdasarkan waktu dan peristiwa yang dituliskan dalam serangkaian tulisan ilmiah sehingga dapat diterima dan mudah dipahami. Dalam penulisan kajian sejarah memiliki batasan tahap penelitian yang biasa disebut batasan masalah. Batasan masalah terbagi atas dua macam, yakni: batasan temporal dan batasan spasial.

### **a. Batasan Temporal**

Batasan temporal adalah batasan waktu penelitian. Batasan temporal sangat penting dalam penulisan sejarah agar penelitian yang dilakukan lebih difokuskan pada tahun yang menjadi objek utama dalam penelitian.

Tahun 1960-1968 menjadi batasan temporal penelitian ini. Tahun 1960 merupakan tahun awal ditanamnya beberapa tanaman industri di Bantaeng dan masuk dalam beberapa program pemerintah, seperti Operasi Gerakan Makmur dan dalam program ini belum menggunakan istilah tanaman wajib akan tetapi hanya menggunakan istilah tanaman industri/perdagangan. Barulah kemudian pada tahun 1966 dicetuskan program gerakan tanaman wajib dan untuk tanamannya sendiri dikenal dengan istilah tanaman wajib industri serta pada tahun-tahun ini pemerintah meningkatkan usaha produksi tanaman industri/ekspor. Gerakan tanaman wajib ini berakhir pada tahun 1968 karena pemerintah mencetuskan program baru yakni Rencana

Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang kemudian mulai diberlakukan pada tahun 1969 dan sering dikenal dengan istilah Pembangunan Lima Tahun (PELITA).

b. Batasan Spasial

Batasan spasial merupakan batasan tempat atau wilayah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis, maka batasan spasial dalam penelitian ini yakni penerapan tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng dipilih menjadi wilayah objek penelitian karena merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terlibat aktif dalam program Tanaman Wajib ini.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai masalah di atas, dan dengan penerapan tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng 1960-1968 menjadi awal masuknya beberapa tanaman industri/ekspor di Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalam penelitian ini permasalahan yang akan penulis sampaikan adalah proses pelaksanaan tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng pada tahun 1960-1968 dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya tanaman wajib ini.

Untuk menjawab persoalan penelitian di atas maka penulis akan fokus pada:

1. Bagaimana proses penanaman tanaman industri/ekspor di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana dampak dari penerapan tanaman wajib industri bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bantaeng?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanaman industri/ekspor yang ditanam di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan tanaman wajib Industri bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bantaeng.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Setiap penulis akan mengharapkan adanya manfaat dari tulisan hasil penelitiannya, baik itu manfaat untuk dirinya maupun manfaat kepada pembacanya.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa di Kabupaten Bantaeng pada tahun 1960-1968 pernah diterapkan tanaman wajib industri serta memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pada masa itu. Sehingga jika kembali diterapkan pada masa sekarang akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat maupun daerah.
2. Penelitian ini dapat memberikan data dan informasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian yang sama selanjutnya.
3. Manfaat bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar S1 di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam memperoleh bukti sejarah dengan mengumpulkan sumber data agar menghasilkan urutan data yang objektif sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi sehingga tulisan yang dihasilkan dapat dipercaya.

Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Sejarah” terdapat tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan.<sup>18</sup>

### 1. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber atau *heuristik*, sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis penelitian sejarah yang akan diteliti atau dikaji. Dalam proses pengumpulan sumber penulis melakukan penelitian ke kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Disini penulis mencari dan mengumpulkan sumber primer dalam bentuk berupa arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian penulis juga menggunakan buku-buku dan karangan ilmiah sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis. Koleksi buku-buku penulis dapatkan dari Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas) dan beberapa artikel dan jurnal ilmiah yang penulis dapatkan dari internet.

### 2. Verifikasi Sumber

---

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013), hlm. 67.

Pada tahap verifikasi akan dilakukan kritik terhadap data-data yang akan dijadikan sebagai sumber dalam penelitian. Kritik ini berupa autentisitas atau keaslian sumber dan kredibilitas atau keabsahan sumber.

Pada tahap ini penulis melihat apakah data yang didapatkan benar dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng pada masa itu. Dari segi autentisitas penulis melihat bahwa dokumen tersebut asli dengan kualitas kertas yang sudah menguning dan hampir rapuh, kata-kata yang digunakan pada setiap kalimat belum menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) serta pada dokumen tersebut jelas terdapat tandatangan dari bupati Kabupaten Bantaeng pada masa itu.

Dari segi kredibilitas atau keabsahan sumber penulis melihat bahwa pada tahun 1960-1968 pemerintah Kabupaten Bantaeng benar menerapkan program tanaman wajib dapat dilihat dari aturan yang diterapkan, isi surat-surat permintaan bantuan beberapa jenis tanaman kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, serta pembelian beberapa jenis tanaman industri kepada kabupaten yang terlibat dalam program tanaman wajib.

### 3. Interpretasi Data

Interpretasi atau penafsiran merupakan proses dimana seorang peneliti menafsirkan data yang diperoleh dengan tetap mencantumkan data dan keterangan darimana data itu diperoleh. Interpretasi data dilakukan untuk lebih memudahkan dalam penulisan. Interpretasi data ini lebih fokus pada bagaimana seorang peneliti menafsirkan data yang telah

didapat atau data tersebut akan digunakan pada bagian mana dalam penulisan hasil penelitiannya. Interpretasi terdiri atas dua macam, yaitu analisis dan sintesis.

Analisis yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dengan melihat fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini fakta data yang didapatkan berupa adanya jenis tanaman industri yang akan ditanam, adanya aturan penanaman, serta adanya pengaruh dari penerapan tanaman wajib ini terhadap kehidupan masyarakat.

Setelah menganalisis data-data tersebut kemudian dilakukan sintesis atau menyatukan data berdasarkan fakta yang diperoleh dan ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah.

#### 4. Historiografi atau Penulisan

Historiografi atau penulisan adalah tahap terakhir dalam suatu penelitian. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting<sup>19</sup>, sehingga urutan waktu dan perubahan yang terjadi dapat diukur. Penulisan dilakukan setelah semua data yang diperoleh telah diketahui keabsahannya yang kemudian dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah.

---

<sup>19</sup> *ibid.*, hlm. 80.



## 1.7 Tinjauan Pustaka

Dalam proses penyelesaian tulisan ini penulis menggunakan beberapa buku literatur yang memiliki kajian yang sama dengan kajian penulis, hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa masalah yang menjadi objek kajian penulis. Adapun buku literatur yang penulis gunakan diantaranya:

*Sejarah Perkebunan di Indonesia (Kajian Sosial Ekonomi)* adalah buku yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, dalam buku ini membahas tentang komoditi ekspor penting di Indonesia baik pada masa kolonial maupun sampai masa revolusi. Dalam pembahasn buku ini terbagi atas dua bagian. Bagian Pertama, mencakup periode VOC sampai dengan masa Hindia Belanda, termasuk Sistem Tanam Paksa (1830-1870), pada bagian ini disusun oleh Djoko Suryo. Bagian kedua, mencakup periode 1870 – 1942, kemudian masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, masa revolusi 1945-1950, dan masa kemerdekaan tahun 1950-1980-an. Dan bagian kedua ini disusun oleh Sartono Kartodirjo. Kecuali Bab XII yang disusun oleh Djoko Suryo.<sup>20</sup>

Buku *Kopi : Kajian Sosial Ekonomi Komoditi Perkebunan* yang ditulis oleh Dwi Retnandari. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan penting dalam perekonomian nasional, apalagi dengan terjadinya krisis minyak, kopi merupakan salah satu andalan penghasil devisa. Penekanan penulisan dalam buku ini menekankan pada aspek sosial ekonomi perkebunan kopi, utamanya perkebunan kopi rakyat. Selain itu, dalam buku ini juga memuat sejarah tanaman kopi demikian pula dengan aspek teknik budidaya diuraikan secukupnya untuk

---

<sup>20</sup> Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. xxiii.

memperjelas permasalahan. Sejarah Kopi dijelaskan pada Bab II, mulai dari penemuan kopi dan asal tanaman kopi, penyebaran tanaman kopi, sampai pada kopi Indonesia pada masa kolonial. Permasalahan Ekonomi dan Sosial secara detail dijelaskan pada Bab IV dan V, selanjutnya Bab VI khusus permasalahan pemasaran. Kemudian pada Bab VII disajikan industri pengolahan kopi secara ringkas untuk memberi gambaran bagaimana kedudukan kopi di antara para peminumnya dan bagaimana kopi dapat dikonsumsi.<sup>21</sup>

Tulisan San Afri Awang tentang *Kelapa : Kajian Sosial Ekonomi Komoditi Perkebunan*,<sup>22</sup> dalam buku ini menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kelapa yang meliputi sejarah tanaman kelapa, sistem usaha tani dan budidaya tanaman kelapa, pengolahan hasil tanaman kelapa, dan perilaku sosial ekonomi petani kelapa. Sehingga dalam buku ini berisikan *potret* tanaman kelapa Indonesia dan petani atau rumah tangga yang mengusahakan tanaman kelapa. Buku ini juga menekankan pembahasan mengenai sistem pemasaran (tataniaga) kelapa segar, kopra dan minyak kelapa di dalam negeri.

*Sejarah Perekonomian Indonesia* yang ditulis oleh R.Z. Leirissa dkk,<sup>23</sup> buku ini memuat uraian tentang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia sejak masa prasejarah, perkembangan kota-kota dagang dari masa emporium sampai imperium, ekonomi Indonesia masa tanam paksa, masa revolusi, dan masa pembangunan.

---

<sup>21</sup>Dwi Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, *Kopi: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. xxi.

<sup>22</sup> San Afri Awang, *Kelapa: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994).

<sup>23</sup> R.Z. Leirissa dkk, *Sejarah Perekonomian Indoneia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012).

Dalam buku *Revolusi Agraria, Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-negara Dunia Ketiga* yang ditulis oleh Jeffery M. Paige.<sup>24</sup> Pada bab pertama dalam buku ini dibahas awal mula perkembangan komoditas pertanian di negara-negara agraria atau sering disebut dengan negara-negara berkembang yang telah banyak berperan sebagai pemasok hasil-hasil pertanian utama. Karena banyaknya tuntutan ekonomi industri sehingga mendorong terbentuknya berbagai organisasi pertanian yang disesuaikan dengan produksi pasar dunia dan menimbulkan perubahan pada pola-pola tradisional hubungan antara pemilik tanah dan kelas pedesaan. Bentuk baru dari organisasi pertanian maupun sistem pemilikan tanah dan kelas sosial ini didasarkan pada prasyarat produktif sejumlah hasil pertanian ekspor yang relatif kecil.

Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pada abad kedelapan belas, hasil-hasil pertanian sebagian besar adalah tembakau dan gula, dan produksinya terbatas pada Karibia dan Amerika Serikat. Baru kemudian menjelang akhir abad ke kesembilan belas hasil pertanian ini kemudian meluas pada berbagai bahan makanan dan minuman seperti kopi, teh, coklat, beras, dan pisang maupun bahan-bahan mentah industri seperti karet, kapas, sisal, dan minyak kelapa sawit.

Kemudian di bab kedua dalam buku ini juga membahas bagaimana tatanan dunia mengatur negara-negara pertanian utama dan menentukan hasil pertanian ekspor utama masing-masing negara tersebut. Pada bab keempat membahas secara khusus negara Angola sebagai salah satu negara di benua Afrika yang

---

<sup>24</sup> Jeffery M. Paige, *Revolusi Agraria, Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-negara Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Imperium, 2011).

menjadi pengeksport pertama kopi pada tahun 1830 dan menjadi lahan ladang perdagangan pertama yang didirikan pada tahun 1837.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pengaturan penulisan agar tulisan yang dihasilkan tersusun sesuai dengan alur penulisan. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab. **Bab pertama**, berupa latar belakang penulisan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, berisi gambaran umum Kabupaten Bantaeng yang terdiri atas: Letak Geografis Kabupaten Bantaeng, Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Bantaeng, Pengertian Tanaman Wajib Industri, Aturan Tanaman Wajib, dan Tokoh yang Terlibat dalam Program Tanaman Wajib di Kabupaten Bantaeng.

**Bab ketiga**, membahas tentang Penerapan Tanaman Wajib Industri di Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari, Tanaman Industri Kelapa, Tanaman Industri Kopi, Tanaman Industri Kapuk, Tanaman Industri Karet, Tanaman Industri Merica/Lada, dan Tanaman Industri Cengkeh.

**Bab keempat**, membahas tentang Dampak Tanaman Wajib Industri seperti, Respon Petani Terhadap Program Tanaman Wajib Industri, Terbentuknya PT. Kapok Indonesia Perwakilan Makassar dan Lembaga Kapuk Sulawesi Selatan, Terbentuknya Perusahaan Dagang Kopra dengan nama PD. NYIUR INDAH, serta dampak dari penerapan tanaman wajib industri terhadap sosial ekonomi masyarakat. **Bab kelima**, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan dari bab satu sampai bab empat.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

#### 2.1 Letak Geografis Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, dengan posisi 5°21'13" - 5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42"- 120°05'27" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah Selatannya adalah Laut Flores, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jeneponto.<sup>1</sup>

Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak pada pertengahan tepi bahagian Selatan dari jazirah Sulawesi Selatan. Daerahnya terutama menutupi pada bahagian Selatan lereng dan kaki gunung Lompobattang (2870) 90% dari wilayahnya terdiri atas daerah bukit dan pegunungan terutama pada bahagian Utara dan selebihnya merupakan daerah dataran rendah yang sempit membujur sepanjang pantai. Luas Wilayah Kabupaten Bantaeng ± 470 km<sup>2</sup> (47.000 Ha) terdiri atas:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_1480388148BAB\\_6.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1480388148BAB_6.pdf). *Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Investasi Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 – 2019*. diakses tanggal 17 November 2021 pukul 22:04 WITA. hlm.1.

<sup>2</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat-menyurat BKDH Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan pola pembangunan Repelita di daerah Kabupaten Bantaeng*. Nomor Registrasi 933.

1. Tanah Persawahan 2900 Ha ( $\pm 6,1\%$ )
2. Tanah Hutan (hutan tutupan) = (3166 Ha + hutan cadangan 7000 Ha), (2000 Ha hutan rakyat).
3. Tanah kebun, ladang, dan tegalan = 13.205,52 Ha.
4. Selanjutnya, 31.1% terdiri atas tanah-tanah yang sebagian direncanakan untuk dijadikan sawah rakyat ( $\pm 5000$  Ha) dan selebihnya terdiri atas tanah perumputan hewan, rawa-rawa, sungai, dan sebagainya.

Kabupaten Bantaeng yang memiliki ketinggian antara 100 - 500 m dari permukaan laut merupakan wilayah yang terluas atau 29,6 persen dari luas wilayah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut 0-25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah.<sup>3</sup> Letak geografis Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah daratan dan pesisir pantai dengan dua musim iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 14 mm. Dengan adanya kedua musim tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian.<sup>4</sup> Sebagian besar daerah Kabupaten Bantaeng terletak di kaki gunung Lompobattang yang merupakan bekas gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_1480388148BAB\\_6.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1480388148BAB_6.pdf). *ibid.*, hlm. 1.

<sup>4</sup> *ibid.*, hlm. 16.

<sup>5</sup> *Laporan pengumpulan data peninggalan sejarah dan purbakala di Kabupaten Bantaeng*. Dikutip dari skripsi, Nurlindah, "Sejarah Pendidikan di Bonthain (Bantaeng) pada zaman Hindia Belanda 1907-1942", (Makassar: Jurusan Ilmu Sejarah, 2014), hlm. 26.

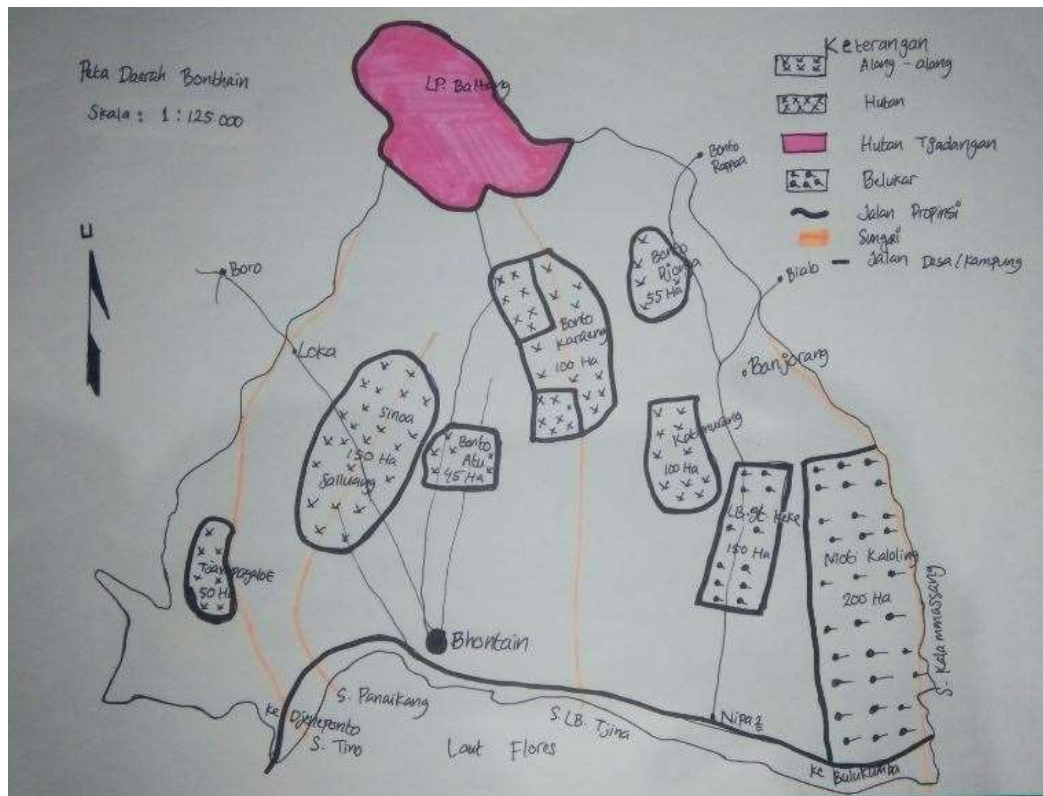
Daerah Bantaeng memiliki jenis tanah *vulkanis* dimana jenis tanah ini sangat cocok dengan pertanian, sehingga tanaman yang ditanam oleh masyarakat Bantaeng cukup beragam misalnya tanaman jangka pendek (padi, jagung, ketela, dan kacang-kacangan), juga tanaman jangka panjang seperti kopi, cengkeh, dan pala yang masih bisa dijumpai pada masa sekarang.<sup>6</sup>

Keadaan lahan di Bantaeng pada tahun 1960-an masih berupa lahan yang ditumbuhi alang-alang, belukar, hutan, dan hutan cadangan.<sup>7</sup> Seperti di daerah TjampagaloE yang ditumbuhi alang-alang seluas 50 Ha, di daerah Sinoa dan Salluang lahan yang ditumbuhi alang-alang seluas 150 Ha, di Lp. Battang terdapat hutan cadangan, daerah Bonto Atu luas lahan alang-alang 45 Ha, di daerah Bonto Karaeng terdapat hutan dan lahan alang-alang, B. Djonga terdapat lahan alang-alang seluas 55 Ha, daerah Katimurang lahan alang-alang 100 Ha, Lb. Gt. Keke terdapat lahan belukar seluas 150 Ha, dan di Moti dan Kaloling terdapat lahan belukar seluas 200 Ha.

---

<sup>6</sup> Lismawati, *Transisi Pemerintahan di Bantaeng Tahun 1950-1959*, (Makassar: Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 14.

<sup>7</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Surat-menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan operasi Gerakan Makmur di Daerah Tingkat II Bonthain/Bantaeng*, Nomor Registrasi 873.



**Gambar 2.1:** Peta Keadaan Lahan di Bantaeng tahun 1960  
(Sumber: Data diolah oleh penulis)

Curah hujan di Kabupaten Bantaeng yang disebutkan dalam Laporan Bulanan Dinas Pertanian Rakyat Dati II Bantaeng bulan Januari tahun 1964 memiliki curah hujan cukup banyak, namun tidak pernah ada hari dimana hujan melebihi 20 mm, hal ini dapat dilihat dari daftar curah hujan pada bulan Januari adalah 96 mm selama 15 hari jika dibandingkan dengan curah hujan bulan yang sama pada tahun sebelumnya yakni 119,5 mm selama 13 hari, rata-rata curah hujan tidak sama pada setiap tahunnya yang berbeda sekitar 147 mm dalam 12 hari.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara (SULSELRA) 1960-1964 Volume II, *Dinas Pertanian Rakyat Dati II Bantaeng: Laporan Dinas Pertanian Rakyat Dati II Bantaeng bulan Januari 1964*. Nomor Registrasi 330.



Berbeda pada tahun 1965 dimana daerah Bantaeng mengalami musim kemarau yang kering dan panjang sehingga menyebabkan perluasan tanaman industri terbatas dan bahkan sebagian besar tanaman mengalami gagal pertumbuhan disebabkan kekeringan yang dialami. Musim kemarau juga menyebabkan debit sungai menurun sehingga keadaan pengairan banyak mengalami kerusakan.<sup>9</sup>

Perbaikan akses jalan sebagai salah satu penunjang yang menghubungkan antar daerah maka pada tahun 1965 diadakan Pemeliharaan Pembetulan dan Perbaikan Jalan dalam lingkup kabupaten Bantaeng. Hal ini telah dibahas dalam musyawarah kerja Daerah Tingkat II Bantaeng tanggal 30 April 1965. Adapun hasil dari perbaikan tersebut adalah:<sup>10</sup>

- 1) Jalanan dalam kota yang telah diaspal sepanjang 8912 m dan jalanan yang belum diaspal 11.010 m, jadi jumlah keseluruhan dari jalanan dalam kota adalah 19.922 m.
- 2) Jalanan luar kota dalam kecamatan Bisappu jurusan Tala-tala - Sinoa – Loka, jalanan yang telah dibuka sepanjang 18 km sedangkan jalanan yang menghubungkan antar kampung baru dibuka sepanjang 13 km. Jalanan tersebut dapat dilalui dengan kendaraan jika bukan pada musim hujan namun jika musim hujan jalanan tersebut tidak dapat dilalui

---

<sup>9</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat dari Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II Bantaeng mengenai rencana kerja pertanian tahun 1965*, Nomor Registrasi 875.

<sup>10</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Berkas Rapat Kerja Bupati/Kepala Daerah Bantaeng dengan Kepala-kepala Jawatan sekabupaten Bantaeng*, Nomor Registrasi 531.

dengan kendaraan disebabkan belum ditambahkan batu sebagai pengeras jalan.

- 3) Jalanan dalam kecamatan Bonthain Tengah/Bantaeng jurusan Pullaweang dikerjakan sepanjang 4 km, jurusan Allu diperbaiki sepanjang 4 km, dan dibuka pula jalanan sepanjang 48 km sebagai penghubung antar kampung.
- 4) Jalanan dalam kecamatan Tompobulu, jurusan Nipa-nipa – Banjorang – Borongrapoa dibuka sepanjang 23 km. Selain itu dibuka pula jalan sebagai penghubung antar kampung sepanjang 48 km.

## **2.2 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Bantaeng**

Berdasarkan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah nomor 1 tahun 1957 dibentuk daerah-daerah tingkat II di seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Kemudian dalam Undang-undang No. 29 tahun 1959 Sulawesi Selatan dibentuk kedalam 37 daerah *swatantra* tingkat II salah satu diantaranya adalah daerah Bantaeng. Kemudian dalam PP pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1964, daerah Bantaeng termasuk dalam wilayah administratif propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pecahan dari daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara.<sup>11</sup>

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu diantara 23 Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor: 29 tahun 1959 tentang “Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi”. Sebelum ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II otonom;

---

<sup>11</sup> Lismawati, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Bantaeng (Bonthain) adalah suatu Daerah *Afdeeling* yang secara administratif/koordinatif mewilayahi empat *Onderafdeling* yaitu : Sinjai, Bulukumba, Selayar, dan *onderafdeeling* Bonthain sendiri.<sup>12</sup>

Bantaeng awalnya bernama “Bonthain”, namun pada tahun 1962 Bonthain dikembalikan kepada nama aslinya yaitu “Bantaeng”, karena nama Bonthain dianggap tidak sesuai dengan awal sejarahnya dan merupakan nama yang diwariskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Perubahan nama tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD-GR Kabupaten Bantaeng Nomor: 1/KPTS/DPR-GR/I/1962 yang ditandatangani oleh A. Rivai Bulu sebagai ketua DPR-GR Daerah Tingkat II Bantaeng dan mulai berlaku sejak 22 Januari 1962, kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Des. 52/2/18-104 tanggal 4 September 1963.<sup>13</sup> Isi surat tersebut berbunyi:

“Nama “Bonthain” yang tercantum dalam Undang-Undang No. 29 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 74 tahun 1959) sebagai nama Daerah Tingkat II dan nama ibukota Daerah diubah menjadi “Bantaeng”.

Pada tanggal 13 Januari 1966 berdasarkan ketetapan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1965 nama Daerah Tingkat II Bantaeng diganti menjadi Kabupaten Bantaeng dan

---

<sup>12</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1873)* Volume 3, (Ujung Pandang: Arsip Nasional R.I. Perwakilan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1995), hlm. ii.

<sup>13</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973)* Volume 3, *Berkas mengenai perubahan nama Bonthain menjadi Bantaeng*, Nomor Registrasi 690.

gelar Bupati Kepala Daerah tetap berlaku. Perubahan nama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1966.<sup>14</sup>

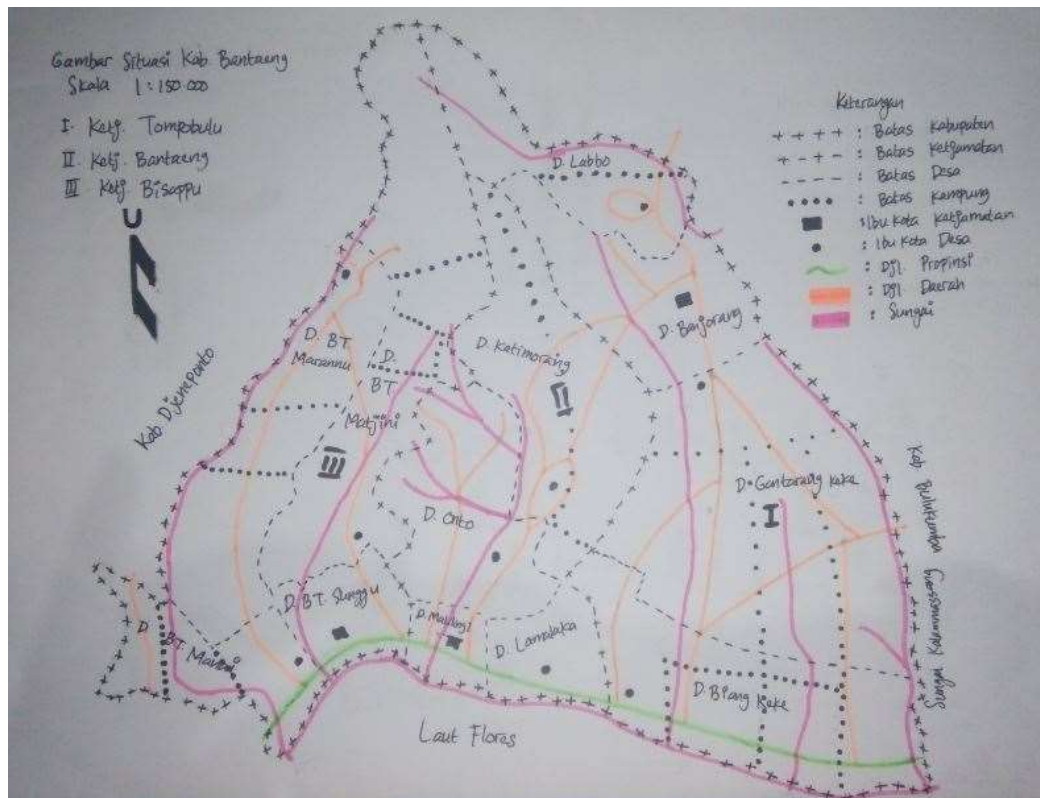
Kabupaten Bantaeng tahun 1960 terbagi atas tiga daerah administratif yakni; 1. Bonthain Barat dengan ibukota Panaikang, 2. Bonthain Tengah dengan ibukota Lembangtjina, dan 3. Bonthain Timur dengan ibukota Lumpangang.<sup>15</sup> Setelah perubahan nama dari Bonthain ke Bantaeng pada 22 Januari 1962 daerah Bantaeng tetap terbagi atas tiga kecamatan, akan tetapi nama kecamatan dan ibukotanya telah berubah yakni; 1. Kecamatan Tompobulu dengan ibukota Banjorang, 2. Kecamatan Bantaeng dengan ibukota Malilingi, dan 3. Kecamatan Bisappu dengan ibukota Bonto Sunggu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bantaeng mengenai penggantian nama Daerah Tingkat II Bantaeng menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng*, Nomor Registrasi 692.

<sup>15</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Ralat mengenai Distrik Bonthain menjadi tiga daerah administratif*, Nomor Registrasi 689.

<sup>16</sup> *ibid.*



**Gambar 2.2 : Peta Pembagian Wilayah Bantaeng tahun 1962 (Sumber: Data diolah oleh penulis)**

- a. Kecamatan Bantaeng dengan luas wilayah 195,64 km<sup>2</sup> terdiri atas desa-desa:<sup>17</sup>
  - Malilingi dengan 4 lingkungan meliputi 18 RK. dan 90 RT.
  - Lamalaka dengan 3 lingkungan meliputi 10 RK dan 39 RT.
  - Onto dengan 3 lingkungan meliputi 13 RK dan 57 RT.
  - Katimorang dengan 4 lingkungan meliputi 11 RK dan 28 RT.
- b. Kecamatan Tompobulu dengan luas wilayah 210,10 km<sup>2</sup>, terdiri atas desa-desa:
  - Banjorung dengan 4 Lingkungan meliputi 17 RK dan 59 RT.

<sup>17</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat-menyurat BKDH Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan pola pembangunan Repelita di daerah Kabupaten Bantaeng*. Nomor Registrasi 933.

- Labbo dengan 2 lingkungan meliputi 6 RK dan 18 RT.
  - Gantarangkeke dengan 6 lingkungan meliputi 32 RK dan 91 RT.
  - Biangkeke dengan 4 lingkungan meliputi 25 RK dan 71 RT.
- c. Kecamatan Bisappu dengan luas wilayah 154,26 km<sup>2</sup> terdiri atas desa-desa :
- Bonto Sunggu dengan 3 lingkungan meliputi 12 RK dan 50 RT.
  - Bonto Manai dengan 3 lingkungan meliputi 13 RK dan 36 RT.
  - Bonto Mattjini dengan 4 lingkungan meliputi 8 RK dan 42 RT.
  - Bonto Maranni dengan 4 lingkungan meliputi 16 RK dan 62 RT.

### 2.3 Pengertian Tanaman Wajib Industri

Tanaman adalah organisme hidup yang tidak dapat berpindah tempat dan dapat memproduksi makanannya sendiri yang dipengaruhi oleh budidaya manusia pada suatu ruang atau media untuk dapat dipanen pada saat tertentu. Tanaman memiliki beberapa kelompok yang dapat dibedakan menurut produknya seperti kacang-kacangan, tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, tanaman industri, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Tanaman perkebunan memiliki sebutan lain, yaitu tanaman perdagangan dan tanaman industri.<sup>19</sup> Tanaman industri merupakan tanaman yang menghasilkan bahan-bahan pokok untuk industri dan sebagai pemasukan devisa

---

<sup>18</sup> Finter Nugraha Putra, *Penerapan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dalam Pemilihan Tanaman Perkebunan Industri*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), hlm. 1.  
[http://repository.uinsuska.ac.id/15836/6/6.%20BAB%20I\\_2018466TIF.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/15836/6/6.%20BAB%20I_2018466TIF.pdf), diakses tanggal 13 Mei 2022 pukul 14:48 WITA.

<sup>19</sup> Tim Penulis PS, *Agribisnis Tanaman Perkebunan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), hlm. 5.

negara yang hasilnya dapat dijual sebagai komoditas ekspor, seperti kelapa, kelapa sawit, teh, kopi, kapas, dan lain-lain.<sup>20</sup> Tanaman industri sebagai komoditas ekspor memiliki peran yang cukup besar dalam membantu perekonomian negara dan masyarakat, sebab masyarakat memiliki lahan perkebunan yang ditanami oleh tanaman industri sehingga masyarakat juga yang mengelola perkebunan industri tersebut. Jadi, tanaman wajib industri adalah tanaman yang diwajibkan untuk ditanam oleh pemerintah agar menghasilkan bahan-bahan pokok industri dan dapat menjadi komoditas ekspor sehingga hasilnya dapat menambah devisa negara.

Sedangkan perkebunan, menurut Undang-Undang tentang Perkebunan yaitu UU No. 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan perkebunan (*plantation*), yang sering disingkat sebagai “perkebunan” merupakan usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen. Dengan pengertian

---

<sup>20</sup> Finter Nugraha Putra, *Loc. Cit.*

ini maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global.<sup>21</sup>

Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan karakteristiknya, yaitu tanaman semusim dan tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang hanya bisa dipanen satu kali dengan siklus hidup satu tahun sekali, misalnya tebu, kapas, dan tembakau. Sementara tanaman tahunan membutuhkan waktu yang panjang untuk bereproduksi, bahkan dapat menghasilkan sampai puluhan tahun dan bisa dipanen lebih dari satu kali, misalnya kelapa sawit, karet, kakao, cengkeh, kopi, dan lada.<sup>22</sup>

Sektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>23</sup>

Sasaran utama dari perkebunan tanaman industri adalah agar dapat menembus pasar luar negeri. Sasaran pembangunan perkebunan diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan

---

<sup>21</sup> Rusdi Evizal, *Dasar-dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 1.

<sup>22</sup> Tim Penulis PS, *Agribisnis Tanaman Perkebunan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> *ibid.*, hlm. 5-6.



melalui peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing perkebunan. Oleh karena itu perkebunan memfokuskan pada komoditas utama, yaitu tebu, kelapa sawit, karet, kakao, jarak pagar, dan kelapa. Prioritas kedua untuk komoditas unggulan nasional, yaitu lada, jambu mete, kapas, rami, kopi, cengkeh, dan teh.<sup>24</sup>

Di Indonesia istilah komoditas perkebunan umumnya merujuk kepada sekelompok tanaman atau komoditas tertentu. Komoditas perkebunan yang utama di Indonesia adalah perkebunan sawit, kelapa, karet, tebu, tembakau, kina, teh, kopi, dan kakao.<sup>25</sup> Selain itu, istilah perkebunan juga menunjuk kepada bidang-bidang lahan pertanaman untuk memproduksi komoditas tanaman industri. Jadi perkebunan terdiri dari banyaknya kebun-kebun pertanaman dalam luasan yang besar.<sup>26</sup>

Dipenghujung tahun 1965 muncul gerakan baru yang dikenal dengan istilah Gerakan Tanaman Wajib yang diprakarsai oleh Fakultas Pertanian, Lembaga Penelitian Pertanian, dan Dinas Pertanian Rakyat Sulawesi Selatan yang juga diayomi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Kemudian dilaksanakanlah pembibitan dan penyebaran bibit yang dipersiapkan oleh Fakultas Pertanian dan Balai Penelitian Cabang Makassar. Dan juga digerakkan mahasiswa-mahasiswa dan para pemikir pembangunan pertanian ke berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan untuk melakukan kampanye penyuluhan dan penyebaran bibit komoditas pertanian jangka panjang. Mahasiswa dibekali

---

<sup>24</sup> *ibid.*, hlm. 7.

<sup>25</sup> Rusdi Evizal, *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> *ibid.*, hlm. 2.

pengetahuan teknis tentang komoditas yang akan dianjurkan. Jenis komoditas disesuaikan dengan saran pakar pertanian yang memahami secara tepat kesesuaian potensi lahan di masing-masing kabupaten.<sup>27</sup>

Gerakan Tanaman Wajib ini kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya surat edaran dari gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Agustus 1966 Nomor: Ia/2643 tentang tanaman wajib terhadap 7 jenis tanaman bahan industri/ekspor. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa penanaman ini harus dilaksanakan secara mandiri, dalam hal pengadaan bibit disediakan oleh daerah masing-masing karena tidak disediakan oleh pemerintah. Walaupun sebelumnya pemerintah pernah melakukan penanaman tanaman wajib namun cara yang dilakukan untuk saat ini berbeda. Cara yang dilakukan pemerintah sekarang adalah paling tepat, cepat, dan revolusioner karena semua potensi yang ada pada petani dilibatkan secara aktif sehingga memiliki fungsi sosial. Hal ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya dimana para petani hanya menunggu adanya bantuan dari pemerintah dan tidak melakukan penanaman jika tidak ada seruan langsung dari pemerintah. Padahal ada tidaknya arahan langsung dari pemerintah mereka harus tetap menanam karena sangat penting bagi perusahaan mereka sendiri. Di sisi lain pemerintah juga menyadari bahwa cara yang ditempuh sangat cepat, namun merupakan satu-satunya cara untuk merubah Sulawesi Selatan dalam waktu yang singkat untuk meningkatkan taraf hidup

---

<sup>27</sup> Radi A. Gany, *Menyongsong Abad Baru Dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 2002), hlm. 88.

petani Sulawesi Selatan dan untuk menambah serta memperkuat kedudukan devisa negara.<sup>28</sup>

Secara keseluruhan Propinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia usaha, dikenal kaya akan sumber daya alam terutama sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan laut. Daerah ini termasuk salah satu lumbung pangan terbesar di kawasan timur Indonesia, sehingga hal ini menjadi kesempatan yang perlu dimanfaatkan untuk membangun daerah Sulsel.

Sulawesi selatan dengan sumber daya alam yang besar memiliki potensi ekonomi yang meliputi beberapa sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan, dan pariwisata. Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sektor yang menjanjikan. Hasil pertanian Sulawesi Selatan berupa tanaman pangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan dalam sektor perkebunan Sulawesi Selatan memiliki hasil utama antara lain, kelapa, kopi robusta dan arabika, kelapa sawit, cengkeh, kakao/coklat, kemiri, tembakau, teh, pinang, karet, lada, kapuk, kapas, sagu, gula aren, vanili, dan jambu mete. Adapun hasil perkebunan yang menjadi andalan Sulawesi Selatan adalah kakao, kelapa, cengkeh, kopi, kapas, dan kelapa sawit.

---

<sup>28</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman, antara lain: tanaman wajib, tanaman export dan masalah pengerahan tenaga pada musim tanam*, Nomor Registrasi 869.

Sulawesi Selatan sejak dahulu dikenal sebagai daerah pertanian berbudaya padi/persawahan. Oleh karena itu, pada awal tahun 1960-an ketika Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan pertama kali menyusun dan mencanangkan strategi pembangunan lima tahunnya, maka sektor pertanian pangan yang pertama kali menjadi primadona pembangunan daerah ini. Pada waktu itu (1962) pembangunan prasarana perhubungan dan irigasi menjadi sasaran pembangunan daerah. Melalui kegiatan Demonstrasi Massal Swa Sembada Bahan Makanan (Dema SSBM) pada tahun 1964/1965 menjadi awal kebangkitan pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan.<sup>29</sup> Dan diawal tahun 1965 kebijaksanaan monokultur dari mengandalkan padi berubah menjadi polikultur.

Perkebunan merupakan penghasil komoditas perdagangan, terutama berorientasi kepada pasar ekspor. Termasuk juga perkebunan rakyat, juga berorientasi kepada pasar, bukan usaha tani yang bersifat subsistem. Petani bahkan tidak dapat memanfaatkan secara langsung produknya sendiri, melainkan harus dijual untuk membeli kebutuhan, termasuk bahan pangan. Maka perkebunan rakyat memerlukan pasokan bahan pangan dari daerah lain. Jika panen bersifat musiman, misalnya kebun kopi dan cengkeh, maka saat menunggu datangnya musim panen merupakan masa paceklik bagi petani. Sebaliknya saat musim panen, petani memiliki cukup uang untuk berbelanja

---

<sup>29</sup> Radi A. Gany, *Op.Cit.*, hlm. 87.

sehingga perdagangan di pasar sangat meningkat, baik perdagangan hasil kebun maupun perdagangan sandang, pangan, dan sarana produksi pertanian.<sup>30</sup>

#### **2.4 Aturan Tanaman Wajib**

Tanaman perkebunan adalah tanaman hutan yang dibudidayakan. Tanaman ini memiliki respon yang baik sekali terhadap lingkungan hidup dari perlakuan yang diberikan. Setelah tanaman hutan dibudidayakan sebagai tanaman perkebunan, maka tanaman ini membutuhkan kondisi tumbuh yang sebaik-baiknya agar potensi pertumbuhan dan produksinya dapat dihasilkan secara maksimal. Kondisi ideal lainnya adalah lingkungan, seperti tanah dan iklim merupakan faktor utama, serta faktor genetik tanaman, yakni melalui tahapan-tahapan penelitian dan pemuliaan terhadap tanaman hutan yang dibudidayakan yang sekarang dikenal sebagai tanaman perkebunan.<sup>31</sup>

Berbagai jenis komoditas perkebunan merupakan sumber devisa yang penting bagi Indonesia yakni hasil dari ekspor CVO kelapa sawit, karet remah, biji kopi, teh, kakao, lada, tembakau dan lain-lain. Sebagai komoditas ekspor maka harga komoditas perkebunan mengikuti pergerakan harga di luar negeri yang umumnya berfluktuasi.<sup>32</sup> Kenaikan harga global terjadi jika permintaan naik atau karena penurunan produksi di negara produsen utama. Untuk sampai ke perusahaan eksportir, komoditas dari perkebunan rakyat melewati rantai

---

<sup>30</sup> Rusdi Evizal, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>31</sup> Soepadiyo Mangoensoekarto, *Manajemen Tanah Dan Pemupukan Budidaya Perkebunan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 1.

<sup>32</sup> Berfluktuasi berasal dari kata fluktuasi yang artinya keadaan turun-naik harga dan sebagainya atau perubahan harga yang terjadi karena adanya pengaruh permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.

pemasaran yang panjang sehingga memperkecil harga yang diterima petani. Harga diterima petani juga banyak ditentukan oleh kebijakan pabrik atau eksportir.<sup>33</sup>

Kegiatan Gerakan Tanaman Wajib di Sulawesi Selatan tahun 1965 diterapkan perwilayahan komoditas, maka pada tahun ini juga dilakukan hal yang sama dalam penyebaran bibit yang disesuaikan dengan potensi lahan di masing-masing kabupaten. Berbeda pada tahun sebelumnya, pada tahun ini pelaksanaan tanaman wajib dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan bibit di daerah masing-masing. Namun jika bibit yang ada tidak mencukupi maka boleh di datangkan dari daerah lain. Demi kelancaran pelaksanaannya, pemerintah juga akan membentuk panitia perencana, pembimbing dan penilai disetiap kabupaten, panitia pembimbing dan pelaksana di setiap kecamatan dan desa, serta diharuskan untuk melaporkan perkembangan atau hasil dari tanaman wajib ini. Untuk memudahkan masyarakat dalam penanaman maka pemerintah akan mengirim tim penerangan atau tim ahli kesetiap daerah untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terkait penanaman ini. Hal ini akan dilakukan dalam pertemuan yang harus dihadiri oleh panca tunggal, semua camat, ketua kelompok tani, dan jawatan-jawatan kemakmuran lainnya.<sup>34</sup>

Setelah gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan instruksi terkait penanaman tanaman wajib industri, maka dalam hal pembibitan tanaman Kepala Dinas Pertanian Rakyat Sulawesi Selatan Ir. Zainuddin memberikan penjelasan

---

<sup>33</sup> Rusdi Evizal, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman.....Loc. Cit.*

bahwa hampir semua jenis tanaman tersebut (kecuali cengkeh dan lada) dapat ditemukan di daerah yang akan melaksanakan tanaman wajib ini.<sup>35</sup>

Tanaman industri memiliki kriteria tanam yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanamnya. Setiap tanaman industri memiliki kriteria tanam yang berbeda, jika suatu lahan perkebunan tidak sesuai dengan kriteria tanaman industri tersebut maka akan menyebabkan gagal panen, kualitas panen yang tidak baik, atau bahkan dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati. Adanya aturan pengwilayahan komoditas tanaman industri maka dalam penanaman bibit harus sesuai dengan kondisi dan potensi lahan masing-masing kabupaten.

Adapun tanaman yang diwajibkan untuk ditanaman di Sulawesi Selatan diantaranya kelapa, kopi, kapuk, kemiri, karet rakyat, cengkeh, dan lada (merica).

#### **a. Kelapa**

Bibit kelapa diambil dari pohon induk (*moederboonen*) yang telah dipilih oleh pegawai pertanian dari kebun kelapa milik rakyat. Petani yang tidak memiliki pohon kelapa harus berusaha sendiri untuk memperoleh bibit. Atau jika bibit tidak mencukupi kebutuhan petani maka harus didatangkan dari daerah lain.<sup>36</sup>

Kelapa ditanam disemua daerah di Sulawesi Selatan yang dibagi dalam dua kategori antara lain:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *ibid.*

<sup>36</sup> *ibid.*

<sup>37</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman..... *ibid.*

- a) Daerah penghasil kopra yaitu: 1. Polewali/Mamasa, 2. Majene, 3. Mamuju, 4. Selayar, 5. Luwu (Palopo), 6. Bulukumba, 7. Pangkajene (Pulau-pulau), dan 8. Pinrang.
- b) Daerah bukan penghasil kopra yaitu: 1. Maros, 2. Gowa, 3. Takalar, 4. Jeneponto, 5. Bantaeng, 6. Sinjai, 7. Bone, 8. Wajo, 9. Soppeng, 10. Sidrap, 11. Pare-pare, 12. Enrekang, dan 13. Tana Toraja.





**Gambar 2.3:**  
 Peta Lokasi Tanaman Wajib Kelapa di Sulawesi Selatan tahun 1966  
 (Sumber: Data diolah oleh penulis)

Bagi daerah-daerah penghasil kopra petani diwajibkan menanam minimal 30 (tiga puluh) pohon kelapa untuk setiap kepala keluarga. Di daerah ini terdapat  $\pm 240.000$  kepala keluarga. Dari jumlah ini diperkirakan sekitar 50% yang akan menanam pohon kelapa. Jadi jumlah pohon kelapa yang akan ditanam adalah 50% dari 240.000 kepala keluarga =  $120.000 \times 40 = 4.800.000$  pohon =  $\pm 30.000$  Ha.<sup>38</sup>

Di daerah bukan penghasil kopra petani diharuskan menanam minimal 5 (lima) pohon kelapa untuk setiap kepala keluarga. Di daerah ini terdapat  $\pm 700.000$  kepala keluarga. Dari jumlah ini diperkirakan 50% akan menanam kelapa. Ini berarti  $50\% \times 700.000 = 350.000 \times 5$  pohon setiap kepala keluarga =  $1.750.000$  pohon kelapa yang akan ditanam atau  $\pm 12.000$  Ha.<sup>39</sup>

Bagi setiap koperasi primer yang bergerak dibidang kopra yang berjumlah 107 unit diseluruh Sulawesi Selatan dianjurkan untuk menanam minimal 1500 (seribu lima ratus) pohon kelapa dalam perlombaan tanaman wajib yang diadakan oleh pemerintah. Jika semua koperasi primer tersebut menanam 1500 pohon kelapa maka jumlah tanaman kelapa baru adalah  $\pm 160.000$  pohon kelapa atau  $\pm 1000$  Ha.<sup>40</sup>

Jika semua rencana penanaman pohon kelapa ini dapat terlaksana dengan baik maka pada tahun 1966/1967 tanaman kelapa akan tercapai sebesar  $30.000 +$

---

<sup>38</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman.....Loc. Cit.

<sup>39</sup> *ibid.*

<sup>40</sup> *ibid.*

12.000 + 1000 = 43.000 Ha, diluar tanaman kelapa yang ada sekarang yang luasnya 59.000 Ha. Dengan demikian maka pada akhir tahun 1967 di Sulawesi Selatan terdapat  $\pm 43.000 + 59.000 = \pm 102.000$  Ha tanaman kelapa.<sup>41</sup>

Tanaman kelapa sebaiknya ditanam di tanah yang agak gembur, pertumbuhan kelapa tidak baik jika tumbuh di air yang tergenang. Air tanah paling tinggi 3 meter dan paling rendah 1 meter. Kelapa akan baik pertumbuhannya jika ditanam  $\pm 400$  meter di atas permukaan laut. Namun, biasanya masih dapat ditanam pada 600-900 meter di atas permukaan laut. Adapun jarak tanam pohon kelapa adalah 8×8 meter.<sup>42</sup>

#### **b. Kopi**

Bibit kopi diambil dari tanaman rakyat sendiri. Kopi harus disemaikan terlebih dahulu bisa berkelompok maupun individu tergantung dari keadaan lingkungan setempat. Daerah-daerah yang terdapat kopi *arabica* maka kopi *arabica*lah yang harus diutamakan. Dan apabila kekurangan bibit maka dapat diminta di daerah lain.<sup>43</sup>

Ada dua jenis kopi yang akan ditanam, yaitu kopi *arabica* dan kopi *robusta*. Adapun daerah penanamannya adalah:<sup>44</sup>

- a) Untuk kopi *arabica* yaitu: 1. Tana Toraja, 2. Luwu, 3. Enrekang,
4. Polewali/Mamasa, 5. Gowa, 6. Banataeng, 7. Bulukumba, 8.

---

<sup>41</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman.....Loc. Cit.*

<sup>42</sup> *ibid.*

<sup>43</sup> *ibid.*

<sup>44</sup> *ibid.*

Jenepono, 9. Sinjai. Adapun letaknya  $\pm 800$  meter di atas permukaan laut.

b) Adapun lokasi untuk kopi *robusta* yaitu: 1. Bantaeng, 2. Bulukumba, 3. Sinjai, 4. Bone, 5. Wajo, 6. Polewali, 7. Luwu, 8. Enrekang, 9. Pinrang, 10. Gowa, 11. Mamuju, 12. Selayar, 13. Sidenreng Rappang, 14. Soppeng, 15. Maros, 16. Majene, 17. Jenepono, 18. Barru. Adapun letaknya  $\pm 800$  meter di atas permukaan laut.

Petani diwajibkan menanam minimal 50 (lima puluh) pohon kopi *arabica* dan kopi *robusta* untuk setiap kepala keluarga. Adapun bibitnya diusahakan sendiri oleh petani. Sehingga luas areal yang akan dicapai adalah:<sup>45</sup>

a) Tanaman kopi *arabica* sebanyak 10% dari 400.000 kepala keluarga =  
 $400.000 \times 10\% = 40.000$  pohon.

b) Tanaman kopi *robusta* sebanyak 20% dari 870.000 kepala keluarga =  
 $870.000 \times 20\% = 174.000$  pohon.

Jadi jumlah keseluruhan adalah  $40.000 + 174.000 = 214.000$  pohon atau  $\pm 13.000$  Ha.

Sebelum bibit kopi ditanam, terlebih dahulu ditanam pohon pelindung seperti: dadap, *albizzia*, lantoro (*laucena glauca*). Dadap dan *albizzia* ditanam dengan jarak  $12 \times 12$  meter, dan *laucena glauca*  $6 \times 6$  meter. Dadap dan *laucena glauca* dapat ditanam dengan stek dan *albizzia* ditanam dengan biji. Adapun

---

<sup>45</sup> *ibid.*

jarak tanam (*plantverband*) kopi robusta 2,5×2,5 meter dan kopi arabica 2×2 meter.<sup>46</sup>

### c. Kapuk

Tanaman kapuk ditanam disemua kabupaten di Sulawesi Selatan di daerah dataran rendah ±500 meter diatas permukaan laut. Semua petani diharapkan menanam minimal 25 pohon untuk setiap kepala keluarga. Tanaman wajib ini diutamakan ditanam dibeberapa daerah kabupaten seperti: Jeneponto, Bone, Soppeng, Wajo, Bulukumba, Bantaeng, Luwu, Palopo, Enrekang, Sidrap, Majene, Selayar, dan Sinjai. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 1966 berjumlah ± 5 juta jiwa, yang terdiri atas ±1 juta jiwa adalah kepala keluarga. Dari 1 juta kepala keluarga ini sekitar 50% atau 500.000 kepala keluarga akan diwajibkan menanam sebanyak  $500.000 \times 25 = 12.500.000$  pohon kapuk atau ± 120.000 Ha.<sup>47</sup>

Adapun bibit didapatkan dari daerah-daerah seperti: Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Majene, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Luwu, Polmas, dan Sidrap. Petani harus mengusahakan bibit kapuk sendiri dengan memperhatikan petunjuk dari Dinas Pertanian setempat. Bagi daerah yang belum memiliki bibit akan diusahakan didatangkan.<sup>48</sup>

Sebelum ditanam biji kapuk disemaikan terlebih dahulu dan setelah berumur 6-8 bulan atau lebih bisa ditanam sebagai *stumps*. Jarak tanam untuk

---

<sup>46</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman.....Loc. Cit.*

<sup>47</sup> *ibid.*

<sup>48</sup> *ibid.*

kapuk ialah 8×8 meter dan yang memiliki jenis pohon yang besar adalah 10×10 meter. Adapun tinggi pagarnya antara 2-3 meter.<sup>49</sup>

#### **d. Kemiri**

Kemiri dapat ditanam disemua kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada di ketinggian ± 1000 meter diatas permukaan laut. Daerah-daerah yang menjadi penghasil kemiri semua petani diharuskan menanam 50 (lima puluh) pohon kemiri untuk setiap kepala keluarga. Terutama di daerah-daerah kritis (*bovenstar troongelbied*) seperti antara lain Tana Toraja, Enrekang, Majene, Bone (Ponre), dan Soppeng sekitar Gunung Lompobatang, dianjurkan untuk memperbanyak menanam kemiri untuk tahun 1966/1967. Jika seperti ini diperkirakan akan tertanam ± 92.000 Ha tanaman kemiri.<sup>50</sup>

Semua daerah harus menyediakan sendiri bibit yang akan ditanam. Bagi daerah yang kekurangan maupun tidak memiliki bibit maka akan didatangkan dari daerah lain. Biji kemiri dapat ditanam langsung diantara tanaman jagung atau padi ladang. Dapat juga ditanam pada musim kering di antara alang-alang yang kemudian ketika terkena panas api maka kulit biji kemiri menjadi pecah dan akan tumbuh ketika hujan turun. *Plantverband* 8×8 meter dan dalam satu lubang ditanam dua biji kemiri.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *ibid.*

<sup>50</sup> *ibid.*

<sup>51</sup> *ibid.*

**e. Karet Rakyat**

Tanaman Karet hanya dapat tumbuh pada daerah yang curah hujannya rata sepanjang tahun, sehingga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:<sup>52</sup>

a. Daerah yang memang dapat ditanami karet:<sup>53</sup>

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1. Bulukumba | 3. Luwu   |
| 2. Sinjai    | 4. Polmas |

b. Daerah-daerah yang diharapkan tanaman karet dapat tumbuh:<sup>54</sup>

- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| 1. Bantaeng | 5. Sidenreng Rappang |
| 2. Barru    | 6. Pinrang           |
| 3. Soppeng  | 7. Enrekang          |
| 4. Wajo     |                      |

Daerah yang telah memiliki perkebunan karet, misalnya: Bulukumba, Sinjai, Barru, Soppeng, Luwu, dan Polmas, petani di daerah tersebut untuk tahun 1966/1967 harus menambah luas areal penanamannya minimal 50 Ha. Dan bagi daerah yang belum memiliki perkebunan karet namun dianggap telah dapat ditanami karet misalnya: Bantaeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, dan Enrekang petani di daerah ini diwajibkan menanam karet minimal 30 Ha untuk setiap petani. Bagi daerah-daerah Bulukumba dan Luwu dapat memperoleh bibit melalui *ondermeaning* setempat. Sedangkan untuk daerah-daerah kabupaten

---

<sup>52</sup>Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman.....Loc. Cit.

<sup>53</sup> *ibid.*

<sup>54</sup> *ibid.*

lainnya akan didatangkan bibit dari Pulau Jawa, melalui perwakilan dana tanaman keras Sulawesi Selatan.<sup>55</sup>

Jumlah luas areal tanaman karet Sulawesi Selatan untuk tahun 1966/1967 dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>56</sup>

No.	Daerah/ Kabupaten	Nama Perkebunan/ Pengusaha	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Luwu	a. Lamasi	50	-
		b. Tarengge	50	
		c. Uraso	50	
2.	Bulukumba	Perkebunan Karet Karangpuang	50	-
3.	Barru	-	50	Tanaman Rakyat
4.	Sinjai	Swasembada Sinjai	50	
5.	Soppeng	P.N. Mekatani VI	50	Tanaman Rakyat
6.	Polewali Mamasa	-	50	Tanaman Rakyat
7.	Bantaeng	-	30	Tanaman Rakyat
8.	Sidenreng Rappang	-	30	Tanaman Rakyat
9.	Pinrang	-	30	Tanaman Rakyat
10.	Enrekang	-	30	Tanaman Rakyat
Jumlah			520 Ha	-

*Tabel 2.1:* Jumlah dan luas areal tanaman karet Sulawesi Selatan 1966/1967

#### f. Cengkeh

Cengkeh dapat tumbuh dengan baik di ketinggian  $\pm$  1000 meter di atas permukaan laut. Cengkeh tidak dapat tumbuh dengan baik di tempat yang digenangi air dan sebaiknya cengkeh ditanam pada tanah yang miring (*hellend*).

Kabupaten yang dapat melaksanakan tanam wajib cengkeh adalah:<sup>57</sup>

<sup>55</sup> *ibid.*

<sup>56</sup> *ibid.*

<sup>57</sup> *ibid.*



No.	Kabupaten/Kota	Luas
1.	Barru	25 Ha
2.	Bulukumba	10 Ha
3.	Enrekang	10 Ha
4.	Luwu	50 Ha
5.	Sidrap	10 Ha
6.	Sinjai	10 Ha
7.	Tana Toraja	50 Ha
8.	Wajo	10 Ha
Jumlah		175 Ha

**Tabel 2.2:** Luas perkebunan tanaman cengkeh di Sulawesi Selatan

Bibit cengkeh akan didatangkan dari Pulau Jawa, Minahasa, dan Maluku. Cengkeh mulai ditanam pada umur  $\pm 2$  tahun dan diberi pelindung. Pelindung bisa dengan atap alang-alang, daun kelapa, ataupun tanaman hidup misalnya: *Crotalaria*, *tophrosia*, atau kelopak pisang. Jarak tanam cengkeh 8×8 meter atau 10×10 meter tergantung luasnya tanah. Pada umur 4-5 tahun cengkeh sudah mulai berbunga.<sup>58</sup>

**g. Lada (Merica)**

Lada dapat tumbuh dengan baik di ketinggian  $\pm 500$  meter di atas permukaan laut. Daerah yang akan ditanami lada adalah: Luwu 10 Ha, Bone 10 Ha, Gowa 5

---

<sup>58</sup> *ibid.*

Ha, Mamuju 20 Ha, Sinjai 10 Ha, Wajo 10 Ha, Soppeng 15 Ha, dan Takalar 10 Ha. Jadi jumlah yang akan ditanami lada adalah 90 Ha.<sup>59</sup>

Sebagai tiang untuk menjalar digunakan tanaman hidup seperti: dadap, dan *clyriciden*. Kayu dapat juga digunakan sebagai tiang seperti: kayu besi, tunas kayu jati, dan jenis kayu lainnya yang kuat. Bibit dapat digunakan stel yang panjangnya 25×25 cm, *plantverband* 2½ × 3½ atau 3×3 meter.<sup>60</sup>

Daerah-daerah yang wajib ditanami lada dan cengkeh apabila kekurangan bibit maka harus segera melaporkan kepada Inspeksi Pertanian di Makassar sebanyak bibit yang diperlukan. Bibi-bibit tersebut akan dijual dengan harga yang lebih murah.<sup>61</sup> Bagi daerah-daerah yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bibit yang telah disebutkan di atas maka boleh meminta bantuan dengan membeli bibit dari daerah lain atau secara langsung meminta bantuan kepada Kepala Dinas Pertanian Rakyat Sulawesi Selatan.

## **2.5 Tokoh Yang Terlibat Dalam Program Tanaman Wajib di Kabupaten Bantaeng**

Terlaksananya program tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah maupun masyarakat tani. Jika masyarakat tani yang menggarap lahan dan mengurus tanaman maka pemerintah pun memiliki peran dalam penyediaan dan penyebaran bibit tanaman ke daerah

---

<sup>59</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman..... Loc. Cit.*

<sup>60</sup> *ibid.*

<sup>61</sup> *ibid.*

lokasi tanam, mengusahakan perbaikan dan kemudahan akses jalan bagi petani, serta menyediakan tempat pemasaran hasil produksi tanaman industri. Beberapa tokoh yang terlibat dalam program tanaman wajib ini adalah sebagai berikut:

**a. A. Rivai Bulu**

A. Rivai Bulu adalah salah satu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng yang menjabat pada tahun 1960 – 1965. Dimasa pemerintahannya beliau berperan aktif dalam perbaikan Kabupaten Bantaeng salah satunya adalah dalam penanaman tanaman industri di Kabupaten Bantaeng.

Pada tahun 1965 A. Rivai Bulu sebagai Bupati Kepala Daerah Bantaeng mengeluarkan surat terkait *Crash Program* dalam lingkungan Bantaeng yang merupakan program jangka pendek dibidang pangan dan dalam program tersebut juga terdapat penanaman tanaman bahan industri/ekspor. Tanaman industri yang ditanam dalam *Crash Program* ini adalah kelapa, kapuk/randu, dan kopi. Ketiga tanaman tersebut diadakan peremajaan dan perluasan tanaman <sup>62</sup>

**b. Soltan**

Soltan merupakan Bupati Kabupaten Bantaeng tahun 1966 – 1970. Diawal pemerintahannya beliau melanjutkan program perbaikan ekonomi dari bupati sebelumnya, seperti pada tanggal 24 Agustus 1966 beliau mengeluarkan instruksi tentang peningkatan hasil produksi dan menggiatkan usaha rakyat terhadap tanaman eksport untuk mencapai kemakmuran Daerah Kabupaten

---

<sup>62</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurak BKDH Banteng mengenai Crash Program Pertanian di Daerah Tingkat II Bantaeng*, Nomor Registrasi 874.

Bantaeng. Instruksi tersebut ditujukan kepada para kepala kecamatan, para kepala desa, dan para kepala kampung dalam Kabupaten Bantaeng.<sup>63</sup> Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1966 beliau juga mengeluarkan daftar rencana penanaman tanaman industri di Kabupaten Bantaeng untuk tahun 1966.<sup>64</sup>

Penanaman tanaman industri di Kabupaten Bantaeng mengalami kendala karena beberapa bibit tanaman ada yang bisa diusahakan sendiri oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng namun ada pula yang tidak dapat diusahakan dalam daerahnya. Melihat hal tersebut Bupati Bantaeng, mengirim surat kepada Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 September 1966 perihal permintaan bantuan bibit tanaman beserta fasilitas pengangkutannya sehingga dapat sampai tepat waktu di Bantaeng. Hal yang sama juga dilakukan dengan mengirim surat kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 9 September 1966 terkait permintaan bantuan dengan membeli bibit tanaman wajib seperti, kelapa, kopi, dan merica.<sup>65</sup> Pada tanggal 26 September 1966 beliau juga mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Komando Pelaksana Penanaman Tanaman Wajib. Hal ini dilakukan demi menyukseskan pelaksanaan penanaman tanaman wajib dalam

---

<sup>63</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman.....Loc. Cit.*

<sup>64</sup> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat dari Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II Bantaeng mengenai rencana kerja pertanian tahun 1965*, Nomor Registrasi 875. Lihat tabel 3.1 untuk mengetahui daftar rencana penanaman tanaman wajib industri di Kabupaten Bantaeng tahun 1966.

<sup>65</sup> Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman.....Loc. Cit.*

Kabupaten Bantaeng.<sup>66</sup> Tanggal 6 Agustus 1968 bupati Soltan juga mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan panitia persiapan rencana pembangunan 5 tahun Kabupaten Bantaeng, yang dimana dalam Rencana Pembangunan tersebut juga direncanakan penanaman tanaman industri/ekspor diantaranya, kopi, kelapa, kemiri, kapuk, cengkeh, pala, dan merica.

#### **c. Achmad Lamo**

Achmad Lamo adalah gubernur Sulawesi Selatan tahun 1966. Pada tanggal 1 Agustus 1966 Gubernur Achmad Lamo mengeluarkan instruksi tentang produksi Tanaman Bahan Industri/Ekspor. Instruksi tersebut berisi tentang himbaun kepada semua Walikota, Bupati/Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan agar mengeluarkan surat keputusan kepada daerahnya masing-masing tentang pelaksanaan penanaman wajib terhadap Tanaman Bahan Industri/Ekspor, menetapkan jenis tanaman untuk tiap-tiap kecamatan dan desa, serta melaksanakan tanaman wajib dengan prinsip berdikari karena bibit dari tanaman tersebut telah ada dalam daerah masing-masing. Dengan adanya instruksi langsung dari Gubernur Sulawesi Selatan tersebut sehingga semua kabupaten/kota melaksanakan tanaman wajib ini.

#### **d. Ir. Zainuddin**

Ir. Zainuddin merupakan Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1966. Beliau dalam masa jabatannya sebagai kepala Dinas Pertanian turut terlibat dalam menyukseskan program tanaman wajib di Sulawesi

---

<sup>66</sup> *ibid.*

Selatan. Seperti pada tahun 1966 beliau menetapkan daerah-daerah yang menjadi lokasi tanaman wajib di Sulawesi Selatan beserta luas areal dan jumlah bibit yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tersebut.<sup>67</sup>

Tanggal 18 Agustus 1966 Kepala Dinas Propinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat yang menanggapi instruksi Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 1 Agustus 1966 tentang tanaman wajib terhadap 7 jenis tanaman bahan industri/ekspor. Isi dari surat Kepala Dinas Propinsi Sulawesi Selatan ini adalah penjelasan tentang bibit-bibit untuk tanaman wajib bagi petani dimana pemerintah tidak menyediakan pembiayaan dalam pengadaan bibit karena hampir semua jenis tanaman<sup>68</sup> yang akan ditanam terdapat dalam daerah yang akan melaksanakan wajib tanam ini. Serta jika kekurangan bibit barulah diusahakan didatangkan dari daerah lain. Seperti dari Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Bantaeng mengirim surat tentang permintaan bantuan pengadaan bibit (kelapa, kopi, cengkeh, dan merica) serta memberikan fasilitas dalam mendatangkan bibit tersebut ke daerah Bantaeng sehingga tiba pada waktu yang tepat.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *ibid.*

<sup>68</sup> Jenis tanaman yang diinstruksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwajibkan untuk ditanam adalah kelapa, kopi, kapok, kemiri, karet, lada, dan cengkeh.

<sup>69</sup> *ibid.*